

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pada era reformasi dituntut adanya demokratisasi, dan pembentukan partai politik baru juga berkembang. Menyikapi tuntutan-tuntutan tersebut, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik memberikan peluang bagi seluruh warga negara Republik Indonesia untuk membentuk partai politik. Hal ini dipandang sejalan dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul<sup>1</sup>.

Tumbuhnya partai politik baru, maka pada Pemilu legislatif (Pileg) tahun 1999 tampil 48 partai politik yang bersaing, Pileg tahun 2004 terdapat 24 partai politik. Jumlah partai politik peserta Pemilu turun 50% dari Pemilu sebelumnya. Tetapi pada Pileg tahun 2009 naik lagi menjadi 38 partai politik peserta Pemilu yang bersaing, Pileg 2014 tampil 12 partai politik dan pada Pemilu serentak tahun 2019 peserta Pemilu sebanyak 20 partai politik, 16 diantaranya adalah partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh<sup>2</sup>.

Sistem multipartai memungkinkan jumlah partai politik mudah mengalami perubahan, dimana partai politik baru bisa saja muncul dari adanya tuntutan perubahan dalam masyarakat. Lemahnya sistem partai dan ideologi memungkinkan tidak adanya perbedaan signifikan diantara partai

---

<sup>1</sup> A. Gau Kadir, "*Dinamika Partai Politik di Indonesia*" Sosiohumaniora Vol. 16 No. 2, 2014, hlm. 135. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2019 pukul 07:44 WIB.

<sup>2</sup> "Partai Politik Peserta Pemilu 2019" <https://infoPemilu.kpu.go.id/Pileg2019/verpol/ddkpartai-politik>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 14:18 WIB.

yang ada, yang berbeda hanyalah logo dan warna. Hal ini memungkinkan proses politik berjalan kurang efisien dan efektif<sup>3</sup>.

Selain itu, hasil Pileg era reformasi menunjukkan bahwa tidak sampai 50% partai politik peserta Pemilu mampu meraih kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), bahkan Pileg tahun 2009 yang pesertanya 38 partai politik, ternyata hanya ada 9 partai politik yang mampu memperoleh kursi DPR RI.

**Tabel 1.1**  
**Perolehan Kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia**  
**Tahun 2009**

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI
1	Demokrat	150
2	Golkar	107
3	PDIP	95
4	PKS	57
5	PAN	43
6	PPP	37
7	PKB	27
8	Gerindra	26
9	Hanura	18

*Sumber: Sosiohumaniora, Volume 16 No. 2 Juli 2014: 132 - 136*

Data ini menggambarkan betapa banyaknya “energi politik” yang terbuang tanpa mencapai sasarannya.<sup>4</sup> Realitas politik pada era reformasi menunjukkan adanya penurunan tingkat kepercayaan (*kredibilitas*)

---

<sup>3</sup> A. Gau Kadir, *op.cit.*, hlm. 135.

<sup>4</sup> *Ibid.*

masyarakat terhadap partai politik secara masif. Hal ini dikarenakan partai politik tidak mampu memainkan fungsinya secara optimal. Partai politik tidak memiliki kemampuan mengerahkan dan mewakili kepentingan warga negara maupun menghubungkan warga negara dengan pemerintah.

Masa reformasi tumbuh suburmya partai politik coba dikontrol dengan serangkaian peraturan dan syarat yang ketat dalam sebuah Undang-Undang partai politik dan Pemilu. Sejarah menunjukkan bahwa pembatasan tujuannya adalah untuk mengeliminasi partai yang sesungguhnya tidak diinginkan kehadirannya, proses itu kemudian berkembang di Indonesia menjadi lebih luas lagi, sehingga *parlementary* menjadi ambang batas parlemen untuk mengikuti Pemilu berikutnya bagi partai yang telah ikut Pemilu, tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah partai politik.<sup>5</sup>

Hal ini didasarkan adanya keinginan untuk menciptakan sistem presidensial yang stabil dan efektif dengan meminimalisir kegaduhan pada tata kelola pemerintahan, dengan demikian fase baru tersebut memunculkan keharusan sebuah kompetisi antar partai politik untuk mampu terpilih dan menduduki kursi pada lembaga legislatif. Hal ini mendorong partai politik untuk menjadi lebih serius memperluas dukungan konstituennya dan untuk selalu memperbaiki organisasi partainya. Upaya ini penting, karena idealnya partai politik membutuhkan basis massa yang loyal dan organisasi partai yang baik untuk dapat memenangkan Pemilu. Apabila partai politik dengan

---

<sup>5</sup> Achmad Zakaria, “Pembatasan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dalam Perspektif Demokrasinya”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Vol. 2 No. 1, 2016, hlm. 2. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2019 pukul 08:00 WIB.

sebenarnya-sungguhnya menjalankan upaya tersebut, maka sistem kepartaian di Indonesia lambat laun akan menjadi terlembaga<sup>6</sup>.

Partai politik di era reformasi belum dapat menjadi institusi publik yang menunjukkan tanggungjawab terhadap pemilihnya, saat memasuki reformasi partai politik dihadapkan pada tuntutan masyarakat yang begitu besar, sementara partai politik belum siap dengan pelembagaan yang baik. Sejumlah faktor yang membuat tingkat pelembagaan partai belum berkembang dengan baik adalah partai-partai yang ada umumnya relatif baru sehingga infrastruktur partai belum terbangun dengan baik. Selain itu, partai kerap mengalami konflik yang menguras tenaga dan waktu sehingga tidak ada waktu untuk membangun pelembagaan partai politik. Elit-elit partai pun belum menjadikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai satu-satunya aturan dalam mengelola partai politik.<sup>7</sup>

Pelembagaan partai biasa dilakukan melalui penguatan empat komponen kunci, yakni pengakaran partai (*party rooting*), legitimasi partai (*party legitimacy*), aturan dan regulasi (*rule and regulation*), dan daya saing partai (*competitiveness*). Pengakaran partai dimaksudkan agar partai terikat secara organik dengan masyarakat, khususnya dengan konstituennya. Dengan ini partai dapat secara berkelanjutan menjalankan fungsi-fungsinya yang

---

<sup>6</sup> Aisah Putri Budiarti, "Pelembagaan Sistem Kepartaian di Bawah Sistem Demokrasi Indonesia (1998- sekarang)". Jurnal Penelitian Politik. Vol. 12 No. 1, 2015, hlm. 40, diakses pada tanggal 6 Oktober 2019 pukul 08:24 WIB.

<sup>7</sup> Ika, "Pelembagaan Partai Politik Indonesia Masih Lemah"  
ht tps:// ugm.ac.id/id/newsPdf/4509-kelembagaan-partai-politik-Indonesia-masih-lemah, diakses 7 Oktober 2019 pukul 15:00 WIB.

terhubung secara langsung dengan masyarakat. Seperti pendidikan politik, sosialisasi dan komunikasi politik dan juga agregasi kepentingan yang lebih luas<sup>8</sup>.

Dengan demikian, secara keseluruhan pelebagaan partai dapat dilihat dari seberapa besar partai memperkuat dirinya dalam hal pengakaran, penguatan legitimasi, pembuatan aturan main, dan peningkatan daya saing.<sup>9</sup> Oleh karena itu, keberadaan pelebagaan sebuah partai politik harus mampu menancapkan daya eksistensi yang kuat bagi partai politik untuk terus hadir dan bersaing dengan partai politik lainnya.

Pelebagaan partai politik yang dimaksud, menurut Samuel. P Huntington adalah proses pematapan partai politik baik dalam wujud perilaku yang memola maupun dalam sikap atau budaya. Huntington menegaskan bahwa dalam konteks pembangunan politik yang terpenting bukanlah jumlah partai yang ada melainkan sejauh mana kekokohan dan adaptabilitas sistem kepartaian yang berlangsung<sup>10</sup>.

Pelebagaan partai politik menjadi penting untuk di lakukan, agar partai politik dapat berperan dan berfungsi dengan baik. Selain itu, perubahan sistem politik dan meningkatnya kompleksitas yang terjadi dalam masyarakat dibutuhkan sistem pelebagaan partai politik yang baik agar suatu partai

---

<sup>8</sup> "Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan perundang-undangan" <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/507-peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-Pemilu-yang-aspiratif-dan-demokratis.html>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2019 pukul 19:00 WIB.

<sup>9</sup> *Ibid*,

<sup>10</sup> Lili Romli, "Masalah Kelebagaan Partai Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru". Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 21. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2019 pukul 20:16 WIB.

tetap mampu berkompetisi. Sebuah partai yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, akan berakibat pada ketidakmampuannya bertahan dan meraih dukungan dan simpati yang besar dari masyarakat<sup>11</sup>.

Sebagai salah satu pilar demokrasi, tantangan bagi partai politik di Indonesia kedepannya adalah mewujudkan pelebagaan partai politik yang kuat serta mampu menjalankan fungsinya secara maksimal. Pelebagaan partai politik ditujukan untuk membangun partai yang modern, mampu beradaptasi, otonom, serta memiliki ketahanan dan kemampuan dalam mengelola konflik.<sup>12</sup>

Dalam setiap partai politik memiliki strategi yang berbeda-beda dalam membangun pelebagaan di partainya masing-masing guna meningkatkan atau mempertahankan eksistensinya. Sama halnya dengan Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang melakukan penguatan pelebagaan partai politik guna menjaga eksistensi partai politik di masyarakat. Sejarah PAN di Tanjung Jabung Timur tidak terlepas dari pengaruh figur Zulkifli Nurdin yang merupakan anak dari pengusaha kaya Jambi yaitu Nurdin Hamzah yang berasal dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Zulkifli Nurdin pernah menjabat sebagai Gubernur Provinsi Jambi dua periode dan pendiri PAN di Provinsi Jambi sekaligus ketua Dewan Pimpinan

---

<sup>11</sup> Muhammad Lutfi, "Pelebagaan Partai Politik di Tingkat Lokal (Studi Tentang Pelebagaan Partai Golkar di Kabupaten Sinjai Pasca Kekalahan Pada Pemilu 2009)," (Tesis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018), hlm.2. diakses pada tanggal 7 Oktober 2019 pukul 08:00 WIB.

<sup>12</sup> Wein Arifin, "Pelebagaan Partai Politik" <https://w.einarifin.wordpress.com/2015/02/24/pelebagaan-partai-politik/>. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2019 pukul 09:14 WIB.

Wilayah (DPW) PAN Provinsi Jambi. Melalui kekuasaannya di pemerintah dan partai pada periode tahun 2000-2009, Zulkifli Nurdin berhasil membangun jaringan hegemoni kekuasaannya pada kepala daerah, birokrasi, swasta dan tokoh masyarakat. Daya tahan dan kemampuan Zulkifli Nurdin sebagai “aktor lokal” Jambi juga membawa pengaruh pada pelembagaan PAN Tanjung Jabung Timur<sup>13</sup>.

Selain itu, Zumi Zola Zulkifli yang merupakan anak Zulkifli Nurdin juga turut memengaruhi perjalanan PAN Tanjung Jabung Timur. Zumi Zola pernah menjabat sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur periode 2011-2016 dan menjabat Gubernur Jambi tahun 2016-2018 untuk periode 2016-2021. Dalam karir organisasi, Zumi Zola pernah menjadi ketua DPW PAN Provinsi Jambi periode 2015-2020. Sebelumnya, juga pernah menjadi ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Tanjung Jabung Timur dan ketua Barisan Muda (BM) Penegak Amanat Nasional mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2015<sup>14</sup>.

Namun pada tanggal 9 April 2018, Gubernur Jambi yaitu Zumi Zola resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus gratifikasi sejumlah proyek di Jambi<sup>15</sup>, dan pada November 2018 Zulkifli

---

<sup>13</sup> “Zulkifli Nurdin” [https://id.wikipedia.org/wiki/Zulkifli\\_Nurdin](https://id.wikipedia.org/wiki/Zulkifli_Nurdin). Diakses pada tanggal 6 Oktober 2019 pukul 11:00 WIB.

<sup>14</sup> “Zumi Zola Zulkifli” [https://id.wikipedia.org/wiki/Zumi\\_Zola](https://id.wikipedia.org/wiki/Zumi_Zola). Diakses pada tanggal 8 Oktober 2019 pukul 22:00 WIB.

<sup>15</sup> Liputan6, 10 April 2018, diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/3440897/penangkapan-zumi-zola-dan-2-peristiwa-hebohkan-warga-jambi>, Diakses pada tanggal 26 September 2019 pukul 22:10 WIB.

Nurdin meninggal dunia<sup>16</sup>. Dua peristiwa tersebut menjadikan trah Zulkifli Nurdin goyah, namun nyatanya tidak memberikan dampak negatif terhadap PAN di Tanjung Jabung Timur terbukti pada Pemilu serentak tahun 2019 PAN tetap mampu menjaga eksistensinya dengan memperoleh kursi DPRD lebih dari 50% dari jumlah kursi yang tersedia.

Sejak pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di Tanjung Jabung Timur pada tahun 2006, PAN memperoleh suara terbanyak dan berhasil menghantarkan Abdullah Hich sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur periode 2006-2011. Sebelum itu, PAN memperoleh 13 kursi DPRD Kabupaten dari total 30 kursi pada Pileg tahun 2004. Pada Pilkada 2011, Pilkada 2015, Pileg 2009, Pileg 2014, dan Pemilu serentak 2019 PAN selalu berhasil menghantarkan kadernya duduk di posisi orang nomor satu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan selalu mampu memperoleh kursi DPRD terbanyak pada setiap Pileg yang diadakan termasuk pada Pemilu serentak tahun 2019 yang mampu memperoleh 17 kursi dari total 30 kursi DPRD Tanjung Jabung Timur.

---

<sup>16</sup> CNN Indonesia, 29 November 2018, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181129011202-20-350107/ayah-meninggal-zumi-zola-diizinkan-keluar-rutan-kpk>. Diakses pada tanggal 26 September 2019 pukul 19:00 WIB.



**Tabel 1.2**  
**Perolehan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2004**

NO	PARTAI	DAPIL	DAPIL	DAPIL	JUMLAH SUARA	JML KURSI
		1	2	3		
1	PAN	16.035 / 5 kursi	13.339 / 4 kursi	13.617 / 4 kursi	42.991	13 kursi
2	Golkar	6.833 / 2 kursi	10.057 / 3 kursi	4.726 / 2 kursi	21.616	7 kursi
3	PDI P	5.288 / 2 kursi	2.903 / 1 kursi	1.832 / 1 kursi	10.023	4 kursi
4	PKB	1.672 / 1 kursi	1.069 / 1 kursi	691 / 0 kursi	3.432	2 kursi
Total kursi DPRD						30 kursi

*Sumber : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanjung Jabung Timur*

**Tabel 1.3**  
**Perolehan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2009**

No	Nama Partai Politik	Daerah Pemilihan Tanjab Timur			Jumlah Suara	Jumlah Kursi
		1	2	3		
1	PAN	15300	12292	10390	37982	12
2	Golkar	2749	4045	2407	9201	3
3	PDI P	1851	2439	3912	8202	3
4	Hanura	1878	1816	3044	6738	3
5	Demokrat	2263	3793	1052	7108	2
Total kursi DPRD						30

*Sumber : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanjung Jabung Timur*

**Tabel 1.4**  
**Perolehan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014**

No	Nama Partai Politik	Daerah Pemilihan Tanjab Timur			Jumlah kursi
		1	2	3	
1	PAN	5	5	5	15
2	PDI P	1	1	1	3
3	Hanura	1	1	1	3
4	Nasdem	1	1	-	2
5	Golkar	-	1	1	2
6	Demokrat	1	1	-	2
7	PBB	1	-	1	2
Total Kursi DPRD					30

*Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanjung Jabung Timur*

**Tabel 1.5**  
**Perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019**

No	Nama Partai Politik	Daerah Pemilihan Tanjab Timur			Jumlah kursi
		1	2	3	
1	PAN	7	5	5	17
2	Golkar	1	2	1	4
3	PDIP	1	1	1	3
4	Gerindra	1	1	-	2
5	Nasdem	1	1	-	2
6	Hanura	-	-	1	1
7	PBB	-	-	1	1
Total Kursi DPRD					30

*Sumber : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanjung Jabung Timur*

Dalam penelitian terdahulu juga telah ada dijelaskan mengenai pelebagaan partai politik, seperti penelitian yang dilakukan oleh Hatta Abdi Muhammad dengan judul “Pembangunan Pelebagaan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Sebagai Partai Politik Baru di Indonesia” tahun 2018<sup>17</sup>, yang menyebutkan bahwa PERINDO yang mengusung Hary Tanoesoedibjo sebagai identitas partai, terus mencitrakan keduanya pada segmen-segmen tertentu. Dalam hal ini kepemilikan media MNC Group menjadi kekuatan bagi PERINDO. Di sisi lain kunjungan kerja Hary Tanoesoedibjo dengan media MNC Group pada tempat-tempat tertentu, seperti universitas, ruang-ruang keagamaan, dan segmen-segmen lainnya merupakan cara untuk membentuk nilai otonomi Hary Tanoesoedibjo dan PERINDO mengalami kenaikan dalam rangka persiapan menghadapi Pemilu mendatang.

Dalam penelitian lain juga menerangkan penguatan pelebagaan partai politik, yang ditulis oleh Dhimas Yoga Prattama dengan judul “Pelebagaan Partai Nasional Demokrat : Studi Penguatan Elektoral di Kabupaten Nganjuk” tahun 2015<sup>18</sup>, dalam penelitan tersebut disebutkan bahwa DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Nganjuk melakukan upaya pelebagaan partai dengan melalui 4 dimensi pelebagaan, yaitu :

---

<sup>17</sup> Hatta abdi Muhammad, “*Pembangunan Pelebagaan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Sebagai Partai Politik Baru di Inonesia*”. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fisipol Univerisitas Jambi. Vl. 2 No. 1, 2018, hlm. 54. Diakses pada tanggal 26 September 2019 pukul 08:48 WIB

<sup>18</sup> Dhimas Yoga Pratama, “*Pelebagaan Partai Nasional Demokrat : Studi Penguatan Elektoral di Kabupaten Nganjuk*”. Jurnal Politik Muda. Vol. 4 No. 1, 2015, hlm. 114. Diakses pada tanggal 26 September 2019 pukul 09:05 WIB.

*Pertama*, dimensi kesisteman yang ada dalam internal DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Nganjuk mencakup sistem perekrutan, struktur kepengurusan dan pelaksanaan fungsi DPD Partai Nasional Demokrat.

*Kedua*, dimensi identitas nilai (*value infusion*), DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Nganjuk berkembang seiring dengan kultur yang ada di masyarakat Nganjuk dengan menerapkan nilai – nilai nasionalis dimana masyarakat Nganjuk merupakan masyarakat dengan karakter masyarakat abangan yang cenderung menitik beratkan nilai – nilai nasionalis, dengan demikian DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Nganjuk berkembang dengan nilai – nilai yang berasal dari ideologi partai sebagai partai nasionalis dan juga berdasarkan karakteristik masyarakat Nganjuk.

*Ketiga*, dimensi otonomi (*decisional autonomy*), DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Nganjuk di dirikan dengan melakukan pendekatan terhadap masyarakat Nganjuk melalui tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat yang ada. Upaya yang dilakukan adalah membangun hubungan dengan organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk dengan melalui hubungan timbal balik dimana konstituen berupa organisasi masyarakat memberikan dukungan suara atau politik kemudian timbal baliknya adalah DPD Partai Nasional Demokrat yang memberikan wadah bagi organisasi masyarakat atau masyarakat untuk menyalurkan aspirasi mereka.

*Keempat*, dimensi citra publik (*reification*), DPD Partai Nasional Demokrat dalam melakukan upaya membangun citra partai di mata publik dengan melakukan pendekatan melalui organisasi masyarakat (elit organisasi masyarakat) dan ketokohan elit partai. Pendekatan yang diterapkan ini berdampak pada dimana munculnya opini publik berkaitan dengan citra baik dari organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat yang mendukung Partai Nasional Demokrat juga merupakan citra baik dari Partai Nasional Demokrat itu sendiri. Upaya – upaya yang dilakukan oleh DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Nganjuk dalam pencapaian pelembagaan menjelaskan bahwa masih dalam proses melembaga. Sebagai partai politik baru, Partai Nasional Demokrat memerlukan proses untuk mencapai pelembagaan partai untuk menjadi partai politik yang kuat.

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa pelembagaan partai politik penting untuk dilakukan guna menghadapi tantangan partai politik di era reformasi yang menghendaki partai politik lebih matang dalam memperkuat partainya baik internal maupun eksternal yang bertujuan mampu menancapkan daya eksistensi partai politik. PAN Tanjung Jabung Timur di era reformasi memiliki pencapaian yang baik, dan hal ini tidak terlepas dari pelembagaan PAN itu sendiri. Maka dari itu, penulis tertarik untuk memilih judul tentang **“Pelembagaan Partai Amanat Nasional (PAN) Tanjung Jabung Timur di Era Reformasi”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1. Bagaimana pelebagaan PAN Tanjung Jabung Timur di era reformasi?
- 1.2.2. Apakah ada faktor lain diluar proses pelebagaan yang menyebabkan PAN tetap eksis dan menjadi pilihan masyarakat Tanjung Jabung Timur?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

- 1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana pelebagaan PAN Tanjung Jabung Timur di era reformasi
- 1.3.2. Untuk mengetahui apakah ada faktor lain diluar proses pelebagaan yang mennyebabkan PAN tetap eksis dan menjadi pilihan masyarakat Tanjung Jabung Timur

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi untuk menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu politik yang berkaitan dengan pelebagaan partai politik.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Diharapkan menjadi bahan masukan bagi partai politik dan pihak-pihak yang terkait mengenai pembangunan pelebagaan partai politik.

## 1.5. Landasan Teori

Landasan teori merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai partai politik, pelebagaan partai politik, patronase dan klientelisme.

### 1.5.1. Partai Politik

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya<sup>19</sup>.

Adapun fungsi partai politik meliputi: *Pertama*, sosialisasi politik sebagai proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana dia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari kanak-kanak sampai dewasa. *Kedua*, Partisipasi politik adalah fungsi yang dimiliki oleh partai politik untuk mendorong masyarakat agar ikut aktif dalam kegiatan politik. Biasanya dilakukan melalui indoktrinasi ideologi, platform, asas partai kepada anggota, masyarakat yang ada dalam jangkauan partainya<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Cet. 12, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 403.

<sup>20</sup> A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*. cet. 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 104

*Ketiga*, komunikasi politik yaitu fungsi menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. *Keempat*, artikulasi kepentingan adalah fungsi menyatakan atau menyampaikan (mengartikulasi) kepentingan konstituen (masyarakat) kepada badan-badan politik dan pemerintah melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang lain yang memiliki kepentingan yang sama, bentuk artikulasi yang paling umum di semua sistem politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada anggota dewan, parlemen, pejabat pemerintah atau dalam masyarakat tradisional kepada kepala desa atau ketua suku. Idealnya fungsi ini menjadi tugas partai politik untuk mengartikulasikannya<sup>21</sup>.

*Kelima*, agregasi kepentingan adalah menjadi fungsi partai politik untuk memadukan semua aspirasi yang ada dalam masyarakat yang kemudian dirumuskan sebagai program politik dan di usulkan kepada badan legislatif dan calon-calon yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintahan mengadakan tawar-menawar dengan kelompok-kelompok kepentingan, dengan menawarkan pemenuhan kepentingan mereka jika kelompok kepentingan itu mau mendukung calon tersebut.

*Keenam*, pembuat kebijaksanaan fungsi ini adalah fungsi yang dimiliki oleh partai politik setelah partai politik meraih dan mempertahankan kembali kekuasaan di dalam pemerintahan secara konstitusional, kekuasaan dimaksud

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 104-105.



adalah kekuasaan di lembaga eksekutif maupun legislatif. Setelah memperoleh kekuasaan ini, maka partai politik memberikan pengaruhnya dalam membuat kebijaksanaan yang akan digunakan dalam suatu pemerintahan<sup>22</sup>

### 1.5.2. Pelembagaan Partai Politik

Pelembagaan (institusionalisasi) didefinisikan oleh Mainwaring dan Scully sebagai suatu kondisi ketika suatu organisasi menjadi mapan dan diterima oleh banyak pihak<sup>23</sup>. Menurut Huntington bahwa institusionalisasi merupakan suatu proses pada organisasi dan prosedur memperoleh nilai baku dan stabilitas<sup>24</sup>. Sementara menurut Ari Dwipayana, secara sederhana pelembagaan partai modern adalah proses pematapan partai politik (organisasi maupun individu-individu dalam partai) dalam rangka menciptakan pemolaan perilaku atau sikap atau budaya untuk menghasilkan partai politik yang representatif dan mampu menjalankan fungsinya<sup>25</sup>.

Pelembagaan partai juga menyangkut bagaimana partai secara internal mampu memberdayakan dirinya agar tetap eksis menjalankan fungsinya. Institusionalisasi diorientasikan untuk terciptanya partai politik yang memiliki kapasitas pelembagaan yang memadai untuk menjalankan fungsi-fungsinya dan berkompetisi dengan partai-partai lain<sup>26</sup>. Konsep mengenai pelembagaan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 105.

<sup>23</sup> Scott Mainwaring dan Timothy R Scully, *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*, (California: Stanford University Press, 1995), hlm. 1.

<sup>24</sup> Nurlatipah Nasir, *Electoral Volatility Dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik Di Indonesia : Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik Dengan Konstituen*, Jurnal Politik Profetik, Vol. 04, No. 1, 2016. Hlm. 45.

<sup>25</sup> *Ibid*,

<sup>26</sup> *Ibid*,

partai politik telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Dengan merujuk dari beberapa dimensi pelebagaan partai politik yang dikemukakan oleh Huntington, Panebianco, dan Kenneth Janda. Vicky Randall dan Lars Svendsen kemudian merumuskan sebuah konsep pelebagaan partai politik.

Mengambil sumber dari tesis bahwa Vicky Randal dan Lars svсанд merumuskan pelebagaan partai politik yang dipahami sebagai proses pematapan partai politik baik dalam wujud perilaku yang memola maupun dalam sikap atau budaya (*process by which the party becomes established in terms of both of integrated patterns of behaviour and of attitudes, or culture*)<sup>27</sup>. Lebih lanjut keduanya mengelompokkan pelebagaan partai menjadi 4 (empat) dimensi, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.6**  
**Dimensi Pelebagaan Partai Politik**

<b>Dimensi Keperwakilan</b>	<i>Internal</i>	<i>Eksternal</i>
<b>Structural (Struktural)</b>	<i>Systemness</i> (Kesisteman)	<i>Decisional autonomy</i> (Otonomi Keputusan)
<b>Attitudinal (Kultural)</b>	<i>Value infusion</i> (Identitas Nilai)	<i>Reification</i> (Citra pada Publik)

Sumber : Pelebagaan Partai Politik di Tingkat Lokal (Studi Tentang Pelebagaan Partai Golkar di Kabupaten Sinjai Pasca Kekalahan Pada Pemilu 2009)

Proses pelebagaan ini mengandung dua aspek, aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Bila kedua dimensi ini dipersilangkan, maka akan tampak sebuah tabel empat sel, yaitu (1) derajat kesisteman (*systemness*) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal

<sup>27</sup> Muhammad Lutfi, *Op .cit*, hlm. 5

dengan struktural, (2) derajat identitas nilai (*value infusion*) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan kultural, (3) derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*) sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan struktural, dan (4) derajat pengetahuan atau citra publik (*reification*) terhadap suatu partai politik sebagai persilangan aspek eksternal dengan kultural.

Dimensi pelembagaan partai yang dikemukakan oleh Vicky Randall dan Lars Svasand inilah yang kemudian menjadi rujukan dalam penelitian. Alasannya didasarkan bahwa konsep pelembagaan yang diuraikan oleh mereka merupakan hasil perpaduan dari konsep pelembagaan partai yang dikemukakan oleh para ahli. Selain itu, dalam konsepsi ini mencakup pelembagaan internal dan eksternal partai politik. Konsepsi mengenai pelembagaan partai yang dikemukakan oleh Vicky Randall dan Lars Svasand ini kemudian dielaborasi lebih mendalam oleh Ramlan Surbakti<sup>28</sup>.

#### **a. Derajat kesisteman (*Systemness*)**

Kesisteman adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik. Dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur, dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik. AD/ART partai politik dirumuskan secara komprehensif

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 6-7.

dan rinci sehingga mampu berfungsi sebagai kaidah dan prosedur penuntun perilaku dalam melaksanakan semua fungsi partai politik.

Suatu partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi kesisteman bila partai politik melaksanakan fungsinya semata-mata menurut AD/ART yang dirumuskan secara komprehensif dan rinci itu. Derajat kesisteman suatu partai bervariasi menurut: (a) asal-usul partai politik, yaitu apakah dibentuk dari atas, dari bawah, atau dari atas yang di sambut dari bawah; (b) siapakah yang lebih menentukan dalam partai, seorang pemimpin yang disegani atau pelaksanaan kedaulatan anggota menurut prosedur dan mekanisme yang ditetapkan organisasi sebagai suatu kesatuan; (c) siapakah yang menentukan dalam pembuatan keputusan, faksi-faksi dalam partai ataukah partai secara keseluruhan dan (d) bagaimana partai memelihara hubungan dengan anggota dan simpatisan, yaitu apakah dengan klientalisme (pertukaran dukungan dengan pemberian materi) atau menurut konstitusi partai (AD/ART).<sup>29</sup>

**b. Identitas nilai (*Value Infusion*)**

Identitas nilai berkaitan dengan orientasi kebijakan dan tindakan partai politik menurut ideologi atau platform partai. Identitas nilai seperti ini tidak hanya tampak pada pola dan arah kebijakan yang di perjuangkan partai politik tetapi juga tampak pada basis sosial

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.7.

pendukungnya. Lapisan sosial atau golongan masyarakat memberi dukungan kepada suatu partai karena mengidentifikasi orientasi politiknya dengan ideologi atau platform partai itu.

Karena itu derajat identitas nilai suatu partai politik berkaitan dengan (a) hubungan partai dengan kelompok populis tertentu (*popular bases*), yaitu apakah suatu partai politik mengandung dimensi sebagai gerakan sosial yang di dukung kelompok populis tertentu, seperti buruh, petani, dunia usaha, kelas menengah, komunitas agama tertentu, komunitas kelompok etnik tertentu, dan (b) pengaruh klientalisme dalam organisasi, yaitu apakah hubungan partai dengan anggota cenderung bersifat instrumental (anggota selalu mengharapkan *tangible resources* berupa materi dari partai) ataukah lebih bersifat ideologis (anggota mengenal dan mengharapkan partai bertindak berdasarkan identifikasi terhadap ideologi partai).

Suatu partai politik dapat dikatakan telah melembaga dari segi identitas nilai bila partai itu telah memiliki lapisan sosial atau golongan masyarakat sebagai pendukung loyal (basis sosial) karena pola dan arah kebijakan yang diperjuangkannya dan bila dukungan yang diberikan kepada partai itu bukan semata-mata karena menerima materi tertentu dari partai tetapi karena orientasi politiknya sesuai ideologi atau platform partai itu. Partai politik yang mempunyai basis sosial pendukung yang spesifik niscaya akan memiliki identitas nilai

yang jelas. Selain itu karena ideologi partai belum dijabarkan dalam bentuk pola dan arah kebijakan publik yang diperjuangkan, maka perbedaan diantara partai politik itu baru tampak secara simbolis. Karena itu, masih sukar mengkategorikan basis sosial pendukung setiap partai politik di Indonesia.<sup>30</sup>

**c. Derajat Otonomi (*Decisional Autonomy*)**

Derajat otonomi suatu partai politik dalam pembuatan keputusan berkait dengan hubungan partai dengan aktor luar partai, baik dengan sumber otoritas tertentu seperti penguasa atau pemerintah, maupun dengan sumber dana seperti pengusaha, penguasa, negara atau lembaga luar, dan sumber dukungan massa seperti organisasi masyarakat. Pola hubungan suatu partai dengan aktor di luar partai dapat berupa: (a) hubungan ketergantungan kepada aktor luar, (b) hubungan itu bersifat saling tergantung (*interdependen*), dan (c) hubungan itu berupa jaringan (*linkage*) yang memberi dukungan kepada partai.

Suatu partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi otonomi partai bila keputusan partai politik itu tidak di dikte pihak luar tetapi diputuskan sendiri dengan atau tanpa konsultasi dengan aktor luar yang menjadi mitra atau jaringan pendukung partai itu. Suatu partai akan memiliki otonomi dalam pembuatan keputusan bila

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 8-9.

dana untuk membiayai kegiatan partai berasal dari iuran anggota, kontribusi pengurus, dan aktivis di luar iuran<sup>31</sup>.

**d. Pengetahuan Publik (*Retification*)**

Derajat pengetahuan publik tentang partai politik merujuk pertanyaan apakah keberadaan partai politik itu telah tertanam pada imajinasi publik seperti dimaksudkan partai politik itu. Yang menjadi isu utama disini bukan terutama tentang sikap masyarakat mengenai partai politik umumnya, tetapi tentang corak dan kiprah masing-masing partai politik bagi masyarakat. Bila sosok dan kiprah partai politik tertentu telah tertanam pada imajinasi publik seperti dimaksudkan partai itu, maka pihak lain baik individu maupun lembaga di masyarakat akan menyesuaikan aspirasi dan harapannya atau sikap dan perilaku mereka dengan keberadaan partai politik itu.

Suatu partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi pengetahuan publik bila masyarakat umum mendefinisikan sosok dan kiprah partai politik itu sesuai identitas nilai (platform) partai itu sehingga masyarakat pun dapat memahami meski belum tentu setuju mengapa suatu partai politik melakukan jenis tindakan tertentu dan tidak melakukan jenis tindakan lain. Harus dibedakan secara jelas antara mengetahui sosok dan kiprah suatu partai sesuai yang

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 9.

dimaksudkan partai itu dengan sikap setuju atau tidak setuju terhadap sosok dan kiprah partai itu.

Derajat pengetahuan publik ini merupakan fungsi dari waktu dan kiprah partai itu. Makin tua umur suatu partai politik makin jelas definisi atau pengetahuan publik mengenai partai itu. Makin luas dan mendalam kiprah suatu partai dalam percaturan politik, makin mudah bagi kalangan masyarakat untuk mengetahui sosok dan kiprah partai politik itu<sup>32</sup>.

### **1.5.3. Patronase dan Klientelisme**

#### **a. Patronase**

Mengambil sumber dari jurnal, konsep mengenai patronase telah banyak dikemukakan oleh para ahli salah satunya dalam buku “Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014” yang ditulis oleh Aspinall dan Sukmajati pada tahun 2015 yang mendefinisikan Patronase politik adalah pertukaran keuntungan demi memperoleh dukungan politik. Perlu ditekankan disini bahwa unsur pertukaran dalam patronase terkadang problematik. Ketika kandidat mendistribusikan hadiah atau membayar pemilih, sebenarnya mereka tidak yakin dengan bentuk respons balik yang akan diberikan oleh pemilih<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 10-11.

<sup>33</sup> Sidik Firmadi dan Titin Purwaningsih “*Analisis Institusionalisasi Partai Politik Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Kasus DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung)*”. Jurnal



Patronase politik dalam pemilu menurut Aspinall dan Sukmajati memiliki lima model yaitu: Pertama adalah pembelian suara (*vote buying*) yang bermakna, distribusi pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih. Patronase kedua dalam pemilu adalah pemberian-pemberian pribadi (*individual gifts*), contoh barang pemberian seperti bahan makanan atau sembako, seperti beras, gula, minyak goreng, dan mie instan. Patronase politik ketiga dalam pemilu adalah pelayanan dan aktivitas (*services and activities*), contohnya adalah penyelenggaraan pertandingan olah raga, turnamen catur atau domino, forum-forum pengajian, demo memasak, menyanyi bersama, pesta-pesta yang diselenggarakan oleh komunitas dan lain sebagainya.<sup>34</sup>

Patronase politik keempat dalam pemilu adalah pemberian barang-barang kelompok (*club goods*), yang berarti pemberian untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu ketimbang bagi keuntungan individual. Patronase politik kelima dalam pemilu adalah proyek-proyek gentong babi (*pork barrel projects*), yang berarti proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu. Karakter utama dari *pork barrel* adalah bahwa kegiatan ini ditujukan kepada publik dan di danai dengan dana publik dengan

---

Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik. Vol. 3. No. 3, 2016, hlm. 5. Diakses pada tanggal 2 Februari 2020 pukul 11:33 WIB

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 5-6.

harapan publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu<sup>35</sup>.

Patronase politik akan berjalan efektif apabila dengan membentuk relasi yang murni klientelistik, dengan demikian relasi ini tidak semata-mata berupa pertukaran material jangka pendek (*one-off material exchange*) antara kandidat dan pemilih, tetapi menjadi bagian pembentukan relasi jangka panjang yang sama-sama menguntungkan dua pihak, pengulangan seperti ini adalah ciri penting dari klientelisme. Para kandidat biasanya memberikan penghargaan kepada para anggota tim sukses, tidak hanya dengan membayar uang, tetapi juga dengan janji untuk memberikan pekerjaan, kontrak, atau keuntungan lainnya<sup>36</sup>

#### **b. Klientelisme**

Klientelisme bukanlah produk baru dalam sistem demokrasi elektoral dan Pemilu menjadi salah satu momentum terbentuknya pola hubungan klientelisme. Sehingga konsep klientelisme dapat digunakan untuk menjelaskan definisi politik “*who gets what*” dalam masyarakat. Mengambil sumber dari jurnal, Barendschot mendefinisikan klientelisme sebagai dana kampanye dan keuntungan dari negara yang didistribusikan berdasarkan hubungannya terhadap

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 6-7.

dukungan electoral.<sup>37</sup> Dari konsep klientelisme yang dikemukakan oleh Barendschoot menggambarkan bahwa transaksi yang terjadi hanya satu arah karena masih menitikberatkan pada distribusi.

Sedangkan James Scott mendefinisikan klientelisme sebagai mekanisme persahabatan dimana individu dengan status sosial ekonomi yang tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya dengan memberikan perlindungan atau keuntungan atau keduanya kepada orang yang lebih rendah statusnya (klien) yang sebagai bagian dari patron memberikan dukungan dan jasa kepada patron.<sup>38</sup> Definisi ini menjelaskan bahwa pola relasi klientelisme terjadi secara timbal balik atau dua arah dengan mempertukarkan sumber daya masing-masing antara dua pihak yang memiliki status sosial yang tidak setara.

Jika patrimonialisme merujuk pada sistem pemerintahan yang berdasarkan kekeluargaan serta hubungan patron-klien, maka klientelisme merujuk pada ikatan-ikatan personal antara patron dan kliennya. Ikatan ini lebih didasarkan pada pengambilan keuntungan materi antara dua belah pihak.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Muhammad Nur Ramadhan dan Jimmy Daniel Berlianto Oley, "*Klientelisme sebagai Perilaku Koruptif dan Demokrasi Banal*". Jurnal Anti Korupsi Integritas, vol.5, no.1, hlm. 173. Diakses pada tanggal 15 April 2020 pukul 08:54 WIB.

<sup>38</sup> Ainur Rofeq dan Rahmat Nuryono. "*Pengaruh Klientelisme terhadap Perilaku Pemilih Masyarakat Kecamatan Sukatani Pada Pilkada Kabupaten Bekasi 2012*". Jurnal Politik, vol.1, no.2, 2016, hlm.109. Diakses pada tanggal 15 April 2020 pukul 09:13 WIB.

<sup>39</sup> *Ibid*,

Fenomena hubungan patron-klien merupakan hubungan yang penuh emosional pribadi antara orang yang mengabdikan dan memperabdikan. Pola hubungan dalam konteks ini bersifat individual antara dua individu yaitu si patron dan si klien, terjadi interaksi yang bersifat resiprokal atau timbal balik dengan mempertukarkan sumber daya yang dimiliki oleh setiap pihak. Si patron memiliki sumber daya yang berupa kekuasaan, kedudukan atau jabatan, perlindungan, perhatian dan tidak jarang pula sumber daya yang berupa materiil (harta kekayaan, tanah garapan dan uang). Sementara itu klien memiliki sumber daya berupa tenaga, dukungan dan loyalitas.<sup>40</sup>

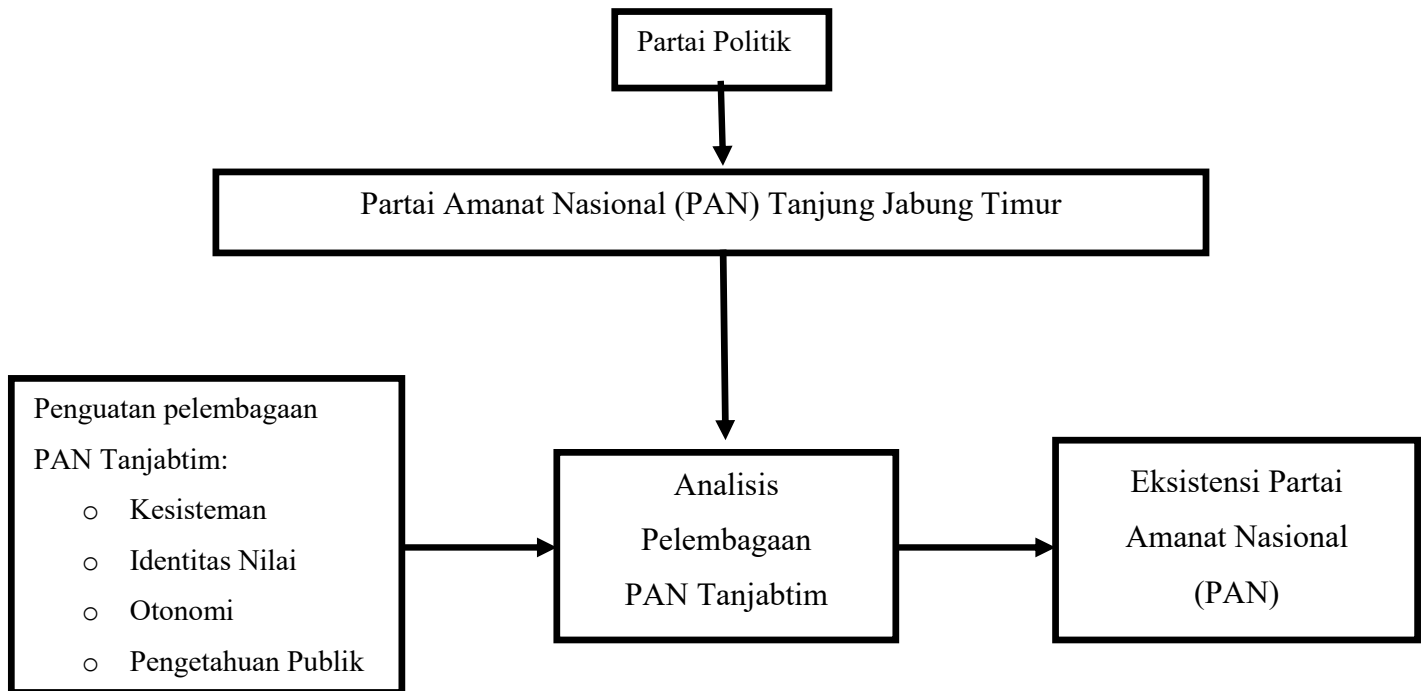
Pola hubungan tersebut akan tetap terpelihara selama masing-masing pihak tetap memiliki sumber daya tersebut. Jika tidak demikian, setiap pihak akan mencari orang lain, apakah mereka itu sebagai patron ataukah sebagai klien. Hal yang perlu diperhatikan pula adalah bahwa yang paling banyak menikmati hasil dari hubungan ini adalah patron, sebab dialah yang memiliki sumber daya yang lebih besar dan lebih kuat ketimbang klien<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup> Kausar AS, *Sistem Birokrasi Pemerintahan di Daerah Dalam Bayang-bayang Budaya Patron-Klien*. Cet. 1, (Bandung: PT. Alumni, 2009), hlm. 7-8.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 8.

## 1.6. Kerangka Pikir



## 1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ada empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.

### 1.7.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif (*qualitative methods*) yaitu metode penelitian yang mengembangkan pertanyaan dasar tentang apa dan bagaimana kejadian itu

terjadi, siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut, kapan terjadinya, dan dimana tempat kejadiannya<sup>42</sup>.

Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses atau langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang atau jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, dan lain sebagainya<sup>43</sup>.

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikan, juga bersifat komperatif dan korelatif, penelitian deskriptif banyak membantu terutama dalam penelitian yang bersifat longitudinal, genetik dan klinis, penelitian survei biasanya termasuk dalam penelitian ini<sup>44</sup>.

### **1.7.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti akan mengungkapkan keadaan yang sebenarnya untuk mendapatkan data-data dan informasi dari objek yang diteliti. Adapun lokasi penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan salah satu

---

<sup>42</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 7, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 23.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>44</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, cet. 15, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 44.

Kabupaten yang ada di Provinsi Jambi dan menjadi bukti dominasi PAN<sup>45</sup>. Tepatnya penelitian akan dilakukan di beberapa Kecamatan yang perolehan suara PAN terbanyak yaitu di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Geragai, Kecamatan Rantau Rasau dan Kecamatan Dendang. Selain itu juga dilakukan di sekretariat DPD PAN Tanjung Jabung Timur.

### **1.7.3. Fokus Penelitian**

Penentuan fokus didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Fokus penelitian yang diperoleh setelah peneliti melakukan penjelajahan umum, dari penjelajahan umum ini peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan terhadap situasi sosial. Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian mengenai pelebagaan partai politik yang dilakukan PAN dalam menjaga eksistensi partai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

### **1.7.4. Teknik Penentuan Informan**

Teknik penentuan informan ialah metode yang dipakai oleh peneliti kualitatif untuk menentukan siapa yang akan menjadi sumber data (informan). Penelitian kualitatif tidak menggunakan sampel oleh karena itu informan yang digunakan berdasarkan pada keterlibatan seorang informan terhadap objek penelitian yang akan diteliti. Dengan cara ini kemudian

---

<sup>45</sup><http://pan.or.id/2019/10/07/cerita-sukses-pan-dominasi-dprd-tanjung-jabung-timur-jambi/>. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2019 pukul 20:00 WIB.

peneliti menentukan berapa jumlah informan yang akan dimintai informasinya berdasarkan keterlibatannya dengan objek penelitian.

Untuk melakukan penelitian mengenai Pelembagaan PAN Tanjung Jabung Timur di Era Reformasi, berikut daftar nama informan dalam penelitian ini:

**Tabel 1.7**  
**Daftar Nama Informan Penelitian**

NO	NAMA	ALASAN
1	Romi Haryanto	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketua DPD PAN Tanjung Jabung Timur</li> <li>▪ Bupati Tanjung Jabung Timur</li> </ul>
2	Mahrup	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketua Bagian Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan (POK) DPD PAN Kabupaten Tanjung Jabung Timur</li> <li>▪ Ketua fraksi PAN DPRD Tanjung Jabung Timur</li> <li>▪ Ketua DPRD Tanjung Jabung Timur</li> </ul>
3	Roni	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sekretaris Bagian POK DPD PAN Kabupaten Tanjung Jabung Timur</li> </ul>
4	Zulfaisal, S. AP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Camat Muara Sabak Timur</li> </ul>
5	Amri Juhardy, S. IP	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Camat Mendahara</li> </ul>
6	Suwandi, A. Md.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Camat Geragai</li> </ul>
7	Budi Wahyu, S. STP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Camat Rantau Rasau</li> </ul>
8	Amiruddin, S. Sos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Camat Dendang</li> </ul>
9	Safaruddin	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komisioner Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan koordinator divisi hukum dan penindakan pelanggaran</li> </ul>



Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, dimana penelitian dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Syarat dan kriteria dalam penentuan informan menurut Spradley dalam jurnal Faisal, yaitu:

- a. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktifitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
- b. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian
- c. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
- d. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau di kemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi<sup>46</sup>

#### **1.7.5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk bahan pembahasan, di dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yang di gunakan, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>46</sup><http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://digilib.unila.ac.id/10385/16/B/AB%2520III.pdf&ved=>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2019 pulul 09:39 WIB

### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) dengan maksud menghimpun informasi dari *interviewee*. *Interviewee* pada penelitian kualitatif adalah informan yang daripadanya pengetahuan dan pemahaman di peroleh<sup>47</sup>. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan<sup>48</sup>. Target peneliti dalam melakukan wawancara beberapa pihak terkait yang dianggap perlu dikumpulkan datanya, terutama ke pihak PAN. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan melalui *in dept interview* yaitu proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus pada penelitian.

### b. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-

---

<sup>47</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 7, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 129.

<sup>48</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, cet. 15, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 83.

gejala yang di selidiki. Dalam penelitian kualitatif observasi di pandang sebagai nafas dari suatu penelitian, melalui observasi langsung peneliti dapat memperoleh data yang diharapkan, tetapi peneliti harus dilatih terlebih dahulu sebelum melakukan observasi sehingga akan menghasilkan data yang baik, tidak seperti seseorang yang menonton suatu pertandingan di TV yang hanya dapat menikmati permainan tersebut tanpa makna<sup>49</sup>.

#### **1.7.6. Teknik Analisis Data**

Menurut Miles dan Huberman, dalam buku Djam'an Satori dan Aan Komariah proses analisis data meliputi:

##### **a. Reduksi Data**

Proses reduksi data ini yaitu data yang diperoleh di tulis dalam bentuk laporan yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil berdasarkan satuan konsep, tema dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan<sup>50</sup>.

##### **b. Penyajian Data**

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, dan sejenisnya. Dan

---

<sup>49</sup> Djam'an Satori, *Op. cit.*, hlm. 106.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 218.

bisa juga dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori<sup>51</sup>.

### **c. Verifikasi Data**

Proses analisis ini yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dilakukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan kesimpulan yang kredibel<sup>52</sup>

#### **1.7.7. Triangulasi Data/Keabsahan Data**

Triangulasi adalah penggabungan berbagai metode dalam suatu kajian tentang satu gejala tertentu. Keandalan dan kesahihan data dijamin dengan membandingkan data yang diperoleh dari satu sumber atau metode tertentu, dengan data dan sumber yang didapat dari sumber atau metode lain. Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi data serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan. Triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkat kebijakan, serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. Triangulasi sebagai

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 219.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 220.

teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu<sup>53</sup>.

---

<sup>53</sup> Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014). Hlm 2019

